ANALISIS PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) (STUDI PADA BAPPEDA KABUPATENPRINGSEWU)

(Skripsi)

Oleh

Ega Putrina

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ANALISIS PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) (STUDI PADA BAPPEDA KABUPATENPRINGSEWU)

Oleh

Ega Putrina

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) (STUDI PADA BAPPEDA KABUPATENPRINGSEWU)

Oleh

Ega Putrina

Penerapan SIPD di Kabupaten Pringsewu dimulai pada tahun 2020 dan ditemukan sejumlah hambatan seperti terkait kurang lengkapya data-data pembangunan yang berguna untuk perencanaan, serta rendahnya keterisian data pembangunan didalam SIPD. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan hasil dari implementasi SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pringsewu serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dari penerapan sistem ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dikaji dengan melihat proses dan hasil dari implementasi kebijakan kemudian menganalisis dengan menggunakan indikator keberhasilan implementasi oleh George Edward III yang terdiri dari 4 indikator yaitu komunikasi,sumberdaya,disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) penerapan penggunaan SIPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pringsewu telah dianggap cukup berhasil dengan adanya proses implementasi yang dilalui mulai dari tahapan sosialisasi pengenalan sistem, pembentukan tim SIPD,penyiapan anggaran, penyiapan sumberdaya fasilitas, pemberian bimbingan teknis,sampai pada proses input data dan rencana kerja anggaran perangkat daerah kedalam SIPD. Hasil dan dampak dari penerapan sistem ini dalam kegiatan perencanaan menunjukan peningkatan capaian pembangunan daerah yang menjadi lebih baik yang ditandai dengan peningkatan indeks capaian pembangunnan manusia di Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2019-2021. (2)Faktor penghambat dari penerapan sistem ini yaitu server sistem yang sering mengalami *error* atau *down*, Sarana dan prasarana (laptop/komputer) yang belum cukup memadai baik di kantor Bappeda maupun perangkat daerah, Terdapat item menu harga satuan dan item menu belanja barang atau jasa yang terkadang tidak muncul dalam sistem.

Kata Kunci : Implementasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, SIPD

ABSTRACT

ANALYSIS OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING THROUGH THE APPLICATION OF LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) (STUDY AT BAPPEDA PRINGSEWU REGENCY)

By

Ega Putrina

Implentation of SIPD in Regency Pringsewu started on 2020, Bappeda find several obstacles related to the lack of complete development data that is useful for planning, as well as the low content of development data in SIPD. This Study is for knowing the process and results from SIPD implementation in the planning development area in Regency Pringsewu and identify related factors blocking the application system. This study is include in descriptive studied qualitative with see process and results of implementation policy then analyze with the use of indicator success implementation by George Edward III consisting of 4 indicators that is communication, resources, disposition, and structure bureaucracy. The results shows that the application use of SIPD in the activity planning development area in Regency Pringsewu has considered enough success with existence process through implementation starting from stages of socialization introduction system, formation team SIPD, setup budget, setup resource facilities, gifts guidance technical, until on data input process and plan work budget device area into SIPD. Results and impact from application system this in activity planning showing enhancement achievements development the site to be more well-marked with enhancement index achievements development man in Regency Pringsewu since the year 2019-2021. Factor blockers from the application system this that is frequent system servers experiencing an error or down, Facilities and infrastructure (laptops/ computers) that have not been enough adequate goods in office Bappeda nor device area, there are price menu items unit and shopping menu items goods or service sometimes no appear in the system.

Keywords: Implementation, Regional Development Planning, SIPD

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) (STUDI PADA BAPPEDA KABUPATENPRINGSEWU)**

Nama Mahasiswa : *Ega Putrina*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816041061**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si
NIP. 197507202003121002

Dra. Dian Kagungan, M.H
NIP. 196908151997032001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	: **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si**	.....
Sekretaris	: **Dra. Dian Kagungan, M.H**	.....
Penguji Utama	: **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si**	.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Januari 2023**

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, sertasanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 09 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Ega Putrina
NPM.1816041061

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ega Putrina, lahir di Gisting, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 24 September 2000. Penulis adalah puteri dari pasangan Bapak Najib dan Ibu Anisa dan merupakan anak terakhir dari empat bersaudara yang memiliki dua orang kakak perempuan dan satu kakak laki-laki.

Sebelum menyelesaikan masa pendidikan di jenjang sarjana, penulis telah menyelesaikan pendidikan formal dimulai dari SD Negeri 2 Banding Agung yang diselesaikan pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Talang Padang yang diselesaikan pada tahun 2015 dan terakhir melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Kemudian pada tahun 2021, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tambahsari Kabupaten Pringsewu selama 40 hari serta mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) MBKM di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pringsewu. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif pada organisasi kampus dan luar kampus yaitu Himagara Unila, BEM Universitas, UKM-F FSPI, dan IKAMM Pringsewu.

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"

(QS Al-Insyirah Ayat 5)

"Setiap hari kita harus memilih, memilih uuntuk berhenti atau berjuang sekali lagi"

(Ega Putrina)

"It always seems impossible, until its done. This too shall pass"

(Anonim)

"Dunia hanyalah seperti cermin yang memantulkan kesempurnaan cinta Allah"

(Jalaluddin Rumi)

"Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara.Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya"

(Ega Putrina)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT
atas segala limpahan rahmat dan hidayah Nya.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,
Kupersembahkan karya tulis ku ini,
Untuk orang-orang yang kusayangi dan menyayangiku:

Ayah dan Ibuku tercinta,
Yang selalu mendoakan serta memberikan kasih sayang,
dukungan, pengorbanan yang tiada habisnya untukku.

Kakak dan saudara-saudaraku tersayang,
Yang selalu mendoakan serta memberikan semangat dan motivasi untukku.

Sahabat-sahabatku,
Yang selama ini selalu berada di sampingku, memberikan banyak kekuatan
dan memberikan warna dalam perjalanan hidupku.

Para Pendidik,
Yang telah memberikan bekal ilmu serta dukungan dan doa.

Almamater Tercinta,
UNIVERSITAS LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT serta berkat doa dan restu dari orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"ANALISIS PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) (STUDI PADA BAPPEDA KABUPATEN PRINGSEWU)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena segala keterbatasan yang ada dan setiap kesalahan yang ada pada penulis dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran bagi penulis dan pembaca kdepeannya untuk lebih baik lagi. Saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, Aamiin.

Bandar Lampung, 09 Januari 2023
Penulis

Ega Putrina

SANWACANA

Alhamdulillahhirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT serta berkat doa dan restu dari orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Penerapan *E-Government* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Studi Pada Bappeda Kabupaten Pringsewu"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dam pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerjasama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing utama. Terimakasih untuk doa, ilmu, waktu, nasihat, saran serta kesabaran yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Semoga segala keikhlasan dan ketulusan Pak Dedy dalam membimbing saya selama ini membawa keberkahan.
2. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih Bu Dian atas doa, ilmu, waktu, bimbingan serta kesabaran yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan revisi. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalamsegala hal.
3. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku dosen pembahas utama. Terima kasih Pak Bambang atas doa, waktu, dukungan, ilmu, segala arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Bapak dan keluarga diberikan kemudahan

dan kelancaran dalam segala hal.

4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih Bu Ita atas doa, waktu, dukungan, ilmu, segala arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Bu Ita dan keluarga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal.
5. Ibu Dra.Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Meiliyana S.IP., M.A selaku ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh penulis pada saat perkuliahan dapat menjadi bekal dan bermanfaat dalam kehidupan penulis kedepannya.
8. Bapak Jauhari dan Mba Wulan selaku Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Terima kasih sudah membantu penulis dalam kelancaran proses skripsi. Semoga dapat terbalaskan dengan kebaikan yang lebih besar untuk Mba Wulan dan Pak Jo.
9. Kedua orang tuaku tersayang, emak dan ebak. Terima kasih atas doa, dukungan, nasihat , dan kasih sayang yang terus kalian berikan sejak penulis dilahirkan sampai saat ini.
10. Guru-guruku tersayang, ibu dan bapak guru SD Negeri 2 Banding Agung, ibu dan bapak guru SMP Negeri 1 Talang Padang, ibu dan bapak guru SMA Negeri 1 Gadingrejo. Terimakasih atas ilmu, arahan dan doa sehingga mampu menghantarkan penulis sampai di titik ini.
11. Kakak dan abangku tercinta, Kak Ayen, Kak Anis dan Abang Furqon. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan. Penulis sangat berharap dapat menjadi adik yang bisa membanggakan untuk kalian.
12. NIM 063, terimakasih untuk segala dukungan moral,doa, dan segala bantuannya. Semoga selalu dilancarkan dan diberikan yang terbaik dalam setiap urusannya. Aamiin..
13. Sahabat- sahabat ciwiku “Happy Girls”, Muti, Putu, Tini, Padila, Yeni dan Fiola. Terimakasih gengs sudah memberi banyak warna dan kenangan

indah mulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Bakalan kangen masak sayur asem sama ikan asin di kosan tinii hehe, jangan pada rebutan es marimas lagii yaa.

14. Sahabat- sahabat Miyaa ku, Panjol, Chizy, Mbak Diiy, dan mbak Fii. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik dan melukis banyak kenangan indah untuk penulis.
15. Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Terimakasih untuk segala bantuan dan dukungannya dalam proses penelitian. Semoga para informan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal.
16. Ex Pimpinan Koalisi Qur'ani FSPI, Sabil, kak ichak, Dina, Irma, Urby, Arda, Diah, Dinda, Rika, Twin Ana Ani, Izzah, Panji, Harido, Risdan, Wahyu, Iksal, Amin, Helmi, Fachrezi, Heri, Anjas, dan Berta. Terimakasih sudah jadi teman belajar dan bertumbuh yaa. Bakal rindu jualan baju syahrini di pasar kaget pake toawwkwk
17. Teman-teman satu angkatan Andalusia (2018), yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih kasih telah menjadi teman berjuang pada masa perkuliahan dari awal hingga saat ini kita memasuki semester terakhir. Semoga segala urusan kalian akan selalu dimudahkan.
18. Teman-teman langkah bersama Ikamm Pringsewu. Rini, Dwi Fathiya, Mba Reffi, dkk. Terima kasih atas segala dukungan kalian selama ini. Semoga urusan kalian dilancarkan.
19. Teman-teman SMA kuu. Nadya, Vina, Putri A, Fiken, Marcel, Ajeng, Nazilla, Destry dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi kawan-kawan terbaik.
20. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA), terima kasih sudah memberikan pengalaman terbaik bagi penulis selama masa perkuliahan.
21. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang bisa penulis berikan.

Akhir kata segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan di dalam skripsi ini, karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sedikit harapan peneliti, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 09 Januari 2023
Penulis

Ega Putrina

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
DAFTAR BAGAN ..... **v**

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Kegunaan Penelitian 10

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu 12
2.2 *Electronic Government* 13
2.2.1 Pengertian *Electronic Government* 13
2.2.2 Prinsip-Prinsip *E-Government* 15
2.2.3 Macam-Macam Relasi Pada *E-Governmment* 16
2.2.4 Manfaat *E-Government* 18
2.2.5 Hambatan Penerapan E-Government 19
2.3 Implementasi Kebijakan Publik 20
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik 20
2.3.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 21
2.4 Perencanaan Pembangunan Daerah 23
2.4.1 Pengertian Perencanaan 23
2.4.2 Pengertian Pembangunan 24
2.4.3 Pengertian Perencanaan Pembangunan daerah 24
2.5 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 27
2.6 Kerangka Pikir 29

III. METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian 30

3.2 Fokus Penelitian 31
3.3 Lokasi Penelitian 32
3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 32
3.4.1 Data Primer 32
3.4.2 Data Sekunder 34
3.5 Analisis Data 35
3.5.1 Reduksi Data 35
3.5.2 Penyajian Data 36
3.5.3 Menarik Kesimpulan 36
3.6 Teknik Keabsahan data 37
3.6.1 Derajat Kepercayaan (*Credibility*) 37
3.6.2 Keteralihan (*Transferability*) 38
3.6.3 Kebergantungan *(Dependeability*) 38
3.6.4 Kepastian (*Confirmability*) 39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu 40
4.1.2 Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Pringsewu 43
4.2 Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 48
4.3 Hasil Penelitian 54
4.3.1 Penerapan SIPD Pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah 54
4.3.2 Faktor-faktor Penghambat Penerapan SIPD Pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah 96
4.4 Pembahasan 98
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 112
5.1 Saran 113
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Pemeringkatan EGDI (*E-Government Development Index*) Indonesia Tahun 2014-2020 3
2. Data Indikator Kinerja Urusan Koperindag 7
3. Data Indikator Kinerja Urusan Pertanian 8
4. Penelitian Terdahulu 12
5. Kelompok Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 27
6. Data Informan Penelitian 33
7. Data Dokumen Penelitian 34
8. Data Jumlah Penduduk Kab Pringsewu 42
9. Susunan Pengelola Administrator SIPD 60
10. Tim Teknis Pengelola SIPD 60
11. Anggaran Penerapan SIPD 68
12. Capaian IPM Kab/Kota Prov Lampung 2019-2021 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Tampilan Awal SIPD 4
2. Tahapan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 5
3. Komponen Analisis Data Interaktif 37
4 Peta Wilayah Kabupaten Pringsewu 41
5. Gedung Bappeda 43
6. Tampilan Login SIPD 48
7. Tampilan Menu SIPD 49
8. Tampilan Jadwal Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 50
9. Tampilan Sub Kegiatan OPD 51
10. Tampilan SIPD Informasi Keuangan 52
11. Data Indikator Kerja Urusan 53
12. Sosialisasi Pengenalan SIPD Oleh Kemendagri 55
13.Dokumen Peraturan Penerapan SIPD di Kab Pringsewu 57
14. SK Tim Pengelola SIPD 59
15. Renja Bappeda Kab Pringsewu 2021..... 67
16. SK Honorarium Tim SIPD 67
17. Ruangan Bidang Perencanaan Bappeda 70
18. Bimtek SIPD Bappeda dengan OPD 73
19. Group WA SIPD 78
20. Tampilan Jadwal Perencanaan SIPD 88
21. Tampilan Input Renja 90
22. Keterisian Data Pembangunan SIPD 2020-2022 92
23. Grafik IPM Kabupaten Pringsewu 94

DAFTAR BAGAN

Bagan Halaman

1. Kerangka Pikir.....29
2. Struktur Organisasi Bappeda 45
3. Mind Map Hasil Penelitian 95

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai macam inovasi yang mampu memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahannya maupun bagi masyarakat luas. Pemerintahan berbasis elektronik juga dapat dipahami sebagai kemampuan lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan sekaligus berinteraksi dengan publik melalui dukungan teknologi internet secara *online* atau media digital lainnya (Alhanatleh dkk., 2021). Dampak dari adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ini mampu memberikan keuntungan (*benefit*) bagi sejumlah pihak mulai dari organisasi pemerintah, organisasi antar pemerintah, organisasi bisnis serta masyarakat luas. Konsep pemerintahan yang berbasis elektronik mampu memberikan manfaat baik berupa efektivitas dan efisiensi pekerjaan bagi pihak pemerintah serta pelayanan yang didapatkan masyarakat menjadi tidak rumit dan lebih mudah.

Penjelasan terkait dengan manfaat teknologi informasi bagi pemerintahan yang telah diuraikan diatas, selaras dengan tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu mendorong adanya koordinasi diantara pelaku pembangunan, menjamin terwujudnya sinkronisasi, integrasi serta sinergi mulai dari daerah, antar daerah , antara pusat dengan daerah, menjamin sinkronisasi dan konsistensi mulai dari perencanaan, penganggaran, pengawasan, mengoptimalkan peran serta masyarakat, serta efesiensi penggunaan sumber daya manusia yang adil dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan *E-Government* Indonesia, yakni pemanfaatan teknologi komunikasi informasi dalam proses kegiatan pemerintahan sehingga terwujudnya efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Banyak ahli mengemukakan terkait definisi dari *Electronic Government* atau yang bisa disebut *E-Government*. Menurut Brown and Brudney (Farazmand, 2018) *Electronic Government* merupakan upaya dalam meningkatkan akses dan penyampaian informasi layanan pemerintah secara efisien dengan penggunaan teknologi, khususnya aplikasi berbasis web. Selaras dengan Ronaghan (Uddin, 2021) yang menyebutkan bahwa *Electronic Government* merupakan upaya dalam pemanfaatan teknologi oleh lembaga pemerintahan guna membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, dunia usaha, atau instansi pemerintahan lainnya dengan memanfaatkan *Wide Area Network* (WAN), *mobile compting*, ataupun internet.

Penerapan *E-Government* di Indonesia dilandasi oleh dua alasan yaitu adanya tuntunan dari publik untuk mendapatkan pelayanan yang mampu dijangkau dengan mudah secara interaktif, serta adanya keinginan dari masyarakat untuk di dengarkan aspirasinya, oleh karena itu pemerintah harus bisa memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dan berdialog di dalam perumusan kebijakan publik. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik adalah dengan penerapan *E-Government* (Nuravita, 2018). Tujuan dari *E-Government* sendiri nyata dari, oleh dan untuk rakyat. Maksudnya rakyat bisa mendapatkan kemudahan akses pelayanan secara *online*, mendapatkan informasi dengan cepat, dan mampu berkontribusi dengan mudah dalam memberikan saran ataupun kritikan kepada pemerintah.

Berdasarkan survey *United Nations* pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke 88 dari 193 negara untuk EGDI (*E-Government Development Index*). Terdapat peningkatan posisi pemeringkatan *E-Government* dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. Pemeringkatan EGDI (*E-Government Development Index*) Indonesia Tahun 2014-2020

No	Tahun	Peringkat
1	2014	106
2	2016	116
3	2018	107
4	2020	88

(Sumber: United Nations E-Government Survey)

Posisi tersebut sebenarnya masih tergolong rendah dikawasan Asia Tenggara dan berada jauh dibawah peringkat negara tetangga seperti Malaysia (peringkat ke-47), Singapura (peringkat ke-11) dan Brunei Darussalam (peringkat ke-60). Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap berusaha dan berkomitmen dalam melakukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah menyadari pentingnya peranan *E-Government* untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. Perencanaan merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam upaya pembangunan daerah, yang dimaksudkan untuk menciptakan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia serta tetap mengedepankan hal yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan.

Pada tahun 2019, Pemerintah mencoba menerapkan teknologi informasi dalam proses perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD mampu menginovasi rangkaian proses perencanaan menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan mampu untuk di pertanggungjawabkan, sesuai dengan aturan dan arahan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 70 tahun 2019. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

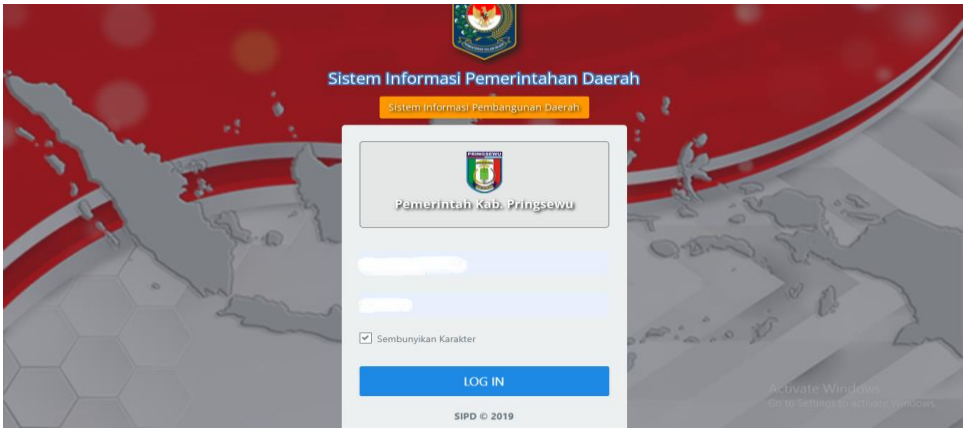

Gambar 1. Tampilan SIPD

(Sumber: pringsewukab.sipd.kemendagri.go.id)

Untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, disetiap daerah otonom dibentuk sebuah lembaga teknis berupa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Walikota/Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda merupakan unsur perencanaan penyelenggara pemerintahan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah mulai dari penyusunan, pengendalian sampai pada evaluasi. Oleh karena itu sudah tentu disetiap daerah memiliki lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan perencanaan salah satunya adalah Kabupaten Pringsewu.Bappeda Kabupaten Pringsewu memiliki tugas yang sama dengan Bappeda di daerah lainnya yaitu untuk menjalankan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Menurut kepala sub bidang perekonomian Bappeda Debit zuliansyah, proses perencanaan yang dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Pringsewu berlandaskan kepada empat aspek meliputi usulan politik (terdiri dari visi misi dari Bupati serta pokok pikiran/reses DPRD), teknokratis (berasal dari usulan OPD yang juga mengacu pada Renstra 5 tahun), partisipatif (usulan-usulan yang didapatkan mulai dari musyawarah desa, musrenbang kecamatan hingga kabupaten), serta *top down and bottom up* (berupa usulan dari pemerintah pusat). (Wawancara, 11 November 2021).

Usulan-usulan tersebut kemudian dihimpun dalam bentuk rencana kerja OPD/SKPD, kemudian tahapan berikutnya OPPD/SKPD melakukan input rencana dan program kerja di aplikasi SIPD kemudian seluruh rencana kerja (Renja) dan program dari OPD/SKPD dijadikan satu dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah input RKPD selesai dilakukan, Bappeda bersama dengan DPRD menentukan RAPBD hingga pada tahapan akhir yaitu penetapan APBD yang dilakukan oleh BPKAD. Secara sederhana jika digambarkan, alur perencanaan di Bappeda Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

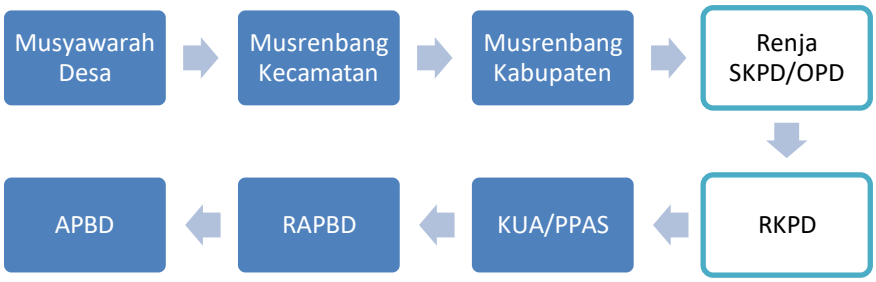

Gambar 2. Tahapan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

(Sumber: Olahan Peneliti 2021)

Sebagai upaya dalam mendorong kualitas perencanaan, setiap pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dituntut untuk mampu menerapkan dan mengembangkan suatu sistem informasi pembangunan dalam proses perencanaan di daerahnya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 30 ayat (1) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa, "Setiap daerah diharuskan membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal (274) tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah , setiap daerah harus mengacu pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Tujuan dikeluarkannya SIPD yaitu agar kegiatan perencanaan

pembangunan daerah dapat dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel dan partisipatif. Selain itu juga sebagai upaya menserasikan pengelolaan sistem informasi pemerintahan secara nasional, menghasilkan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik (kemendagri, 2019).

Pada tahun 2020, Bappeda Pringsewu mulai menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan Pembangunan daerahnya. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang peneliti lakukan ditemukan permasalahan terkait kurang lengkapya data-data pembangunan yang berguna untuk perencanaan, serta rendahnya keterisian data pada *e-database* SIPD. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada saat pra riset, rendahnya keterisian data pembangunan disebabkan SKPD/OPD sering menganggap hal tersebut bukanlah sebuah prioritas, kurangnya komunikasi, manajemen serta tanggung jawab pada setiap OPD terkait tugas input data pembangunan di aplikasi SIPD. Padahal data merupakan unsur utama dalam membuat perencanaan pembangunan daerah yang baik dan berkualitas, data dalam sebuah perencanaan juga mampu dan menjadi indikator penentu keberhasilan dan ketepatan sasaran dari perencanaan pembangunan tersebut.

Berikut merupakan salah satu contoh laporan keterisian data pada *e-database* SIPD Kabupaten Pringsewu:

Tabel 2. Data Indikator Kinerja Urusan Dinas Koperindag

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan industri pengolahan non migas	%	8	9	10	5
2	Kontribusi PDRB industri pengolahan non migas	%	0	0	0	0
3	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan non migas	%	0	0	0	0
4	Pertumbuhan ekspor non migas	%	0	0	0	0
5	Rasio Kewirausahaan Nasional	%	0	0	0	1.65
6	Kontribusi PDB UMKM	%	0	0	0	57.8
7	UMKM naik kelas dan Modernisasi Koperasi (48.000 Unit)	Unit	0	0	0	52
8	Kontribusi PDB Koperasi	%	0	0	0	8
9	Pertumbuhan Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan mobil dan sepeda mot	%	0	0	0	0
10	Pertumbuhan Ekspor Industri Pengolahan non migas	%	0	0	0	0
11	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	%	0	0	0	0
12	Inflasi Pangan Bergejolak	%	0	0	0	
13	Tenaga Kerja di Sektor Industri (juta orang)	Orang	0	0	0	7552
14	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	0	0	0	0
15	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan (USD Miliar)		0	0	0	0
16	Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Unit	0	0	0	0
17	Kawasan Industri (KI) Prioritas di luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investa	Kawasan	0	0	0	0
18	Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	Kawasan	0	0	0	0
19	Kawasan Industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi	Kawasan	0	0	0	0
20	Presentase Tenaga Kerha di Sektor Industri Terhadap Total Pekerja	%	0	0	0	25
21	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	%	0	0	0	0
22	Presentase SNI bidang industri yang di terapkan	%	0	0	0	0.02
23	Presentase Industri Menengah Besar Yang Tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan	0	0	0	0
24	Jumlah Produk Tersertifikasi TKDN >25% yang masih berlaku	Unit	0	0	0	0

(Sumber: Dokumen cetak e-database SIPD Kabupaten Pringsewu 2020)

Tabel 3. Data Indikator Kinerja Urusan Dinas Pertanian

No	Uraian	Satuan	Tahun					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Populasi Ternak Sapi			760	319	529	461		
1	Pringsewu	ekor	2324	2226	2353	2523		
2	Gadingrejo	ekor	174	206	310	321		
3	Ambarawa	ekor	257	324	295	282		
4	Pardasuka	ekor	1659	1995	2027	2274		
5	Pagelaran	ekor	493	558	592	605		
6	Banyumas	ekor	2319	2794	2823	3366		
7	Adiluwih	ekor	2802	3093	3090	3193		
8	Sukoharjo	ekor	118	114	140	113		
9	Pagelaran Utara	ekor	10906	11629	12159	13138		
	Jumlah	ekor	10906	11629	12159	13138		
Jumlah Populasi Unggas								
1	Pringsewu	ekor	289878	371987	252150	252118		
2	Gadingrejo	ekor	2007976	2119326	1369749	1307855		
3	Ambarawa	ekor	46030	55857	67325	43089		
4	Pardasuka	ekor	32540	73113	64610	37144		
5	Pagelaran	ekor	125427	152269	142640	232773		
6	Banyumas	ekor	520521	511154	61667	198552		
7	Adiluwih	ekor	217086	225745	249382	248193		
8	Sukoharjo	ekor	226310	282444	297075	651307		
9	Pagelaran Utara	ekor	29338	25250	68704	101952		
	Jumlah	ekor	3495106	3817145	2573302	3072983		
Jumlah Produksi Daging Ternak Sapi								
1	Pringsewu	Ton/Kg						
2	Gadingrejo	Ton/Kg						
3	Ambarawa	Ton/Kg						
4	Pardasuka	Ton/Kg						
5	Pagelaran	Ton/Kg						
6	Banyumas	Ton/Kg						
7	Adiluwih	Ton/Kg						
8	Sukoharjo	Ton/Kg						
9	Pagelaran Utara	Ton/Kg						
	Jumlah	Ton/Kg	579038	486130	424515	513560		
Jumlah Produksi Daging(Broiler)								
1	Pringsewu	Ton/Kg						
2	Gadingrejo	Ton/Kg						
3	Ambarawa	Ton/Kg						
4	Pardasuka	Ton/Kg						
5	Pagelaran	Ton/Kg						
6	Banyumas	Ton/Kg						
7	Adiluwih	Ton/Kg						
8	Sukoharjo	Ton/Kg						
9	Pagelaran Utara	Ton/Kg						
	Jumlah	Ton/Kg	952476	1058470	1106195	1084846		
Jumlah Produksi Daging(Petelur)								
1	Pringsewu	Ton/Kg						
2	Gadingrejo	Ton/Kg						
3	Ambarawa	Ton/Kg						
4	Pardasuka	Ton/Kg						
5	Pagelaran	Ton/Kg						
6	Banyumas	Ton/Kg						
7	Adiluwih	Ton/Kg						
8	Sukoharjo	Ton/Kg						
9	Pagelaran Utara	Ton/Kg						
	Jumlah	Ton/Kg	4348824	5687013	7101806	7322037		
Jumlah Produksi Susu Sapi								
1	Pringsewu	liter						
2	Gadingrejo	liter						
3	Ambarawa	liter						
4	Pardasuka	liter						
5	Pagelaran	liter						
6	Banyumas	liter						
7	Adiluwih	liter						
8	Sukoharjo	liter						
9	Pagelaran Utara	liter						
	Jumlah	liter						

(Sumber: Dokumen cetak e-database SIPD Kabupaten Pringsewu 2020)

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada beberapa OPD/SKPD keterisian data yang berguna untuk perencanaan pembangunan masih sangat minim. Elemen data perencanaan pada beberapa dinas masih banyak yang belum terisi. Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Kabupaten Pringsewu Bayu setiawan, menyampaikan bahwa penerapan SIPD dalam mendukung ketersedian data perencanaan sebenarnya bisa sangat membantu daerah dalam membuat perencanaan yang berkualitas dan mampu menjawab persoalan yang ada ,jika semua pihak mampu berkomitmen untuk bersama-sama menjalankannya. Namun tidak sedikit dari dinas-dinas merespon aplikasi SIPD ini dengan setengah hati.

Terdapat berbagai manfaat yang bisa dirasakan apabila SIPD dapat diterapkan dengan baik yaitu bisa membuat penyusunan dokumen RPJPD,RPJMD, RKPD, RENSTRA PD dan RENJA PD menjadi lebih efektif dan tepat waktu, karena terdapat batasan waktu yang harus diperhatikan dari setiap rangkaian proses perencanaan, kemudian mampu meningkatkan kualitas perencanaan, karena di dalam aplikasi SIPD menyediakan data pembangunan daerah yang berguna untuk kegiatan perencanaan, terciptanya rumah *legal database* pembangunan bagi seluruh daerah yang berguna sebagai bahan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah. lalu dalam hal pengumpulan data dari SKPD/OPD menjadi lebih efektif dan efisien sehingga bisa menghemat waktu serta anggaran.

Selanjutnya kasubbid perekonomian Bappeda Kabupaten Pringsewu Debit Zuliansyah, menyampaikan bahwa data memang menjadi masalah yang sering dijumpai dalam penyelenggaran perencanaan. Keterisian data pada SIPD juga belum sepenuhnya menjadi perhatian khusus dari OPD/SKPD, sehingga dalam proses pengumpulan data untuk kegiatan perencanaan di Bappeda terkadang masih dilakukan secara manual dengan melakukan koordinasi dan kunjungan langsung ke OPD/SKPD yang terkait. Meskipun demikian, Bappeda tetap berusaha untuk menggunakan sistem ini dalam

proses perencanaanya hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih dua tahun. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Penerapan *E-Government* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Aplikasi SIPD (Studi Pada Bappeda Kabupaten Pringsewu)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan aplikasi SIPD di Bappeda Kabupaten Pringsewu dalam perencanaan kegiatan pembangunan daerah ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat penerapan aplikasi SIPD di Bappeda Kabupaten Pringsewu dalam perencanaan kegiatan pembangunan daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan aplikasi SIPD di Bappeda Kabupaten Pringsewu dalam perencanaan kegiatan pembangunan daerah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan aplikasi SIPD di Bappeda Kabupaten Pringsewu dalam perencanaan kegiatan pembangunan daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual mengenai pelaksanaan SIPD yang berorientasi kepada perkembangan teknologi informasi dalam ranah organisasi pemerintah.
2. Diharapkan mampu menjadi sumbangan penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan *electronic government.*

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Bappeda Kabupaten Pringsewu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada pihak Bappeda agar bisa mengembangkan dan lebih efektif dalam menerapkan Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada kegiatan perencanaan.
2. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dengan penerapan e-government di ranah organisasi pemerintahan, terutama terkait dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).
3. Kegunaan praktis bagi peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah dimana peneliti berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis sekaligus berupaya memecahkan permasalahan yang ada dengan menggunakan metode ilmiah yang baik serta guna memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada tinjauan pustaka memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah secara sistematis baik dari segi konsep maupun teori. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur atau acuan dalam menyelesaikan penelitian ini nantinya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai bahan referensi:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil	Perbedaan Penelitian
1	Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan (M. Irfan Nasution, Nurwani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang menunjukan bahwa penerapan aplikasi SIPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih terdapat cukup banyak hambatan terutama dalam hal penyusunan serta pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan daerah. Dalam melihat bagaimana penerapan aplikasi SIPD pada BPKAD Kota Medan, penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, disposisi serta lingkungan sosial,politik dan ekonomi.	Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selain itu juga terdapat perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pringsewu.

No	Judul	Hasil	Perbedaan Penelitian
2	Penerapan *E-Planning* dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah (Winda Nuravita Universitas Brawijaya 2017)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang menunjukan bahwa penerapan sistem *e-planning* membuat kegiatan perencanaan dan penggaran menjadi lebih efektif. Penelitian ini menggunakan beberapa teori seperti teori administrasi publlik, teori komunikasi organisasi, dan teori perencanaan pembangunan daerah.	Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, dimana penelitian winda membahas terkait dengan implementasi elektronik perencanaan buatan daerah Kabupaten Blitar. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah aplikasi SIPD buatan Kemendagri.
3	Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa di badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang (Reni Kesuma Putri Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang menunjukan Penerapan SIPD pada musrenbang desa bisa dengan baik dilaksanakan. Karena jauh sebelum proses penginputan usulan musrenbang dilakukan, pihak Bappeda Kabupaten Deli Serdang sudah memberikan bimbingan teknis terkait dengan cara input usulan program di aplikasi SIPD.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan, penelitian yang dilakukan oleh Reni berfokus pada pemanfaatan SIPD dalam proses Musrenbang tingkat desa, sedangkan peneliti membahas penerapan atau implementasi SIPD dalam perencanaan di Bappeda Kabupaten Pringsewu.

(Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2021)

2.2 *Electronic Government*

2.2.1 Pengertian *Electronic Government*

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu tujuan dari reformasi pemerintahan adalah untuk mewujudkan *good governance*. Salah satu faktor dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pemerintahan baik untuk pelayanan serta pembangunan. Guna mewujudkan pemerintah yang bisa

menyelenggarakan *goood governance*, penting bagi pemerintah untuk membangun kerjasama yang dilandasi pada hubungan yang partisipatif, responsif dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (Zaman,2020).

Terdapat berbagai definisi dari *Electronic Government* atau yang bisa disebut *E-Government* yang diungkapkan para ahli. Menurut Brown and Brudney (Farazmand, 2018) *electronic government* merupakan upaya dalam meningkatkan akses dan penyampaian informasi layanan pemerintah secara efisien dengan penggunaan teknologi, khususnya aplikasi berbasis web. Indrajit (dalam Nuravita, 2020) menginterpretasikan *E-government* sebagai penggunaan teknologi informasi komunikasi modern dalam melakukan modernisasi pada sistem administrasi . Terdapat beberapa kegiatan administrasi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efesiensi pekerjaan antar departemen atau badan melalui komputerisasi.
2. Sebagai penyediaan akses teknologi informasi komunikasi kepada pengguna layanan serta informasi pemerintahan.
3. Integrasi pelayanan pada badan atau lembaga kepada masyarakat atau antar badan melalui komputerisasi.

Kemudian Ronaghan (dalam Uddin, 2021) menyebutkan bahwa *electronic government* merupakan upaya dalam pemanfaatan teknologi oleh lembaga pemerintahan guna membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, dunia usaha, atau instansi pemerintahan lainnya dengan menggunakan *Wide Area Network* (WAN), *mobile compting*, ataupun internet. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan juga bertujuan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap publik.

2.2.2 Prinsip-Prinsip *E-Government*

Terdapat berbagai perbedaan terkait dengan penerapan *e-government* di setiap negara, karena setiap negara memiliki visi, misi, struktur dan program kerja yang berbeda sehingga mereka harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan negara mereka. Namun, dalam pelaksanaan *e-government* di setiap negara juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip *e-govenment*. Indrajit (dalam Nuravita, 2018) mengemukakan bahwa dalam upaya membangun dan menerapakan e-*government* setidaknya terdapat empat prinsip umum, yaitu sebagai berikut:

1. Fokus terhadap perbaikan pelayanan bagi masyarakat, selama ini banyak sekali jenis pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga pemerintah juga harus memikirkan pelayanan mana saja yang menjadi sebuah prioritas.
2. Membangun lingkungan yang kompetitif. Lingkungan kompetitif yang dimaksudkan berkaitan dengan pemberian layanan kepada masyarakat tidak hanya dibebankan dan dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga memberikan peluang kepada pihak swasta dan non komersial untuk turut serta melakukannya.
3. Memberikan penghargaan terhadap inovasi, serta memberikan ruang kesempatan bagi kesalahan. Konsep *e-government* tergolong sebagai sebuah konsep yang baru, sehingga tidak sedikit negara-negara melakukan eksperimen dengannya. Merupakan sesuatu hal yang wajar jika kita jumpai dari beberapa penerapan program *e–government* mengalami keberhasilan serta kegagalan. Atau terkadang terdapat beberapa pihak yang menentang , namun juga tidak sedikit pihak yang mendukung konsepan ini.

4. Tekankan terhadap pencapaian efisiensi. Berkaitan terhadap dampak yang dihasilkan dalam upaya penyelesaian suatu pekerjaan dengan lebih cepat dan optimal.

2.2.3 Macam-Macam Relasi Pada *E-Governmment*

Terdapat empat tipe relasi dalam konsep *e-government*, yaitu sebagai berikut:

1. *Government to Citizens*

Government to Citizens atau bisa disebut dengan tipe G-to-C merupakan konsep relasi dimana pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan tujuan untuk membangun relasi atau hubungan yang dengan masyarakat. dengan kata lain, bahwa tujuan utama dari konsep ini adalah untuk memudahkan masyarakat berinteraksi dengan pemerintah ataupun sebaliknya, serta kemudahan dalam mendapatkan pelayanan yang mendasar. Contoh penerapan konsep G-to-C yaitu:

- Dinas kependudukan dan catatan Sipil (DISDUKCAPIL) membuat situs layanan administrasi kependudukan secara online dengan maksud mendekatkan dan memudahkan masyarakat alam mendapatkan pelayanan tanpa harus datang ke lokasi dan mengantre lama.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) membuat sebuah aplikasi perizinan online yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan dengan mudah dan cepat.

2. *Government to Business*

Dalam menjaga roda perekonomian agar tetap berjalan dengan semestinya, salah satu tugas pemerintah adalah membentuk lingkungan bisnis yang kondusif. Dalam melaksanakan berbagai kegiatannya, tidak jarang entitiy bisnis semacam sebuah perusahaan swasta membutuhkan data informasi yang dimilliki oleh pemerintah guna menunjang kegiatannya tersebut. Disamping hal tersebut pihak

bisnis yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga pemerintah, karena berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai entitiy bisnis yang berorientasi profit. Akan ada berbagai keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak baik pemerintah maupun pelaku bisnis jika mereka mampu membangun sebuah relasi yang baik . Contoh penerapan konsep G-to-C yaitu:

- Aplikasi pembayaran pajak online oleh Direktoral Jendral Pajak, dimana aplikasi ini bertujuan membantu perorangan atau kalangan bisnis untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah serta melakukan pembayaran pajak secara mandiri melalui intenet.
- Saat ini sudah terdapat sebuah website yang mampu memudahkan proses tender proyek-proyek milik pemerintah dengan pihak swasta mulai dari proses pembelian tender hingga pengumuman pemenangnya. Hal ini tentu dapat menciptakan sebuah efisiensi dari segi waktu dan anggaran.

3. *Govenment to Emplyess*

Konsep ini berkaitan terhadap penerapan *e-government* dalam meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan kinerja bagi pegawai yang bekerja di institusi pemerintahan. Salah satu contoh implementasinya yaitu diterapkannya sesbuah sistem dalam pengembangan karir bagi pegawai pemerintah dengan tujuan untuk melakukan perbaikan pada kualitas sumber daya manusia serta menunjang kegiatan promosi pegawai pemerintahan.

4. *Govenment to Government*

Selain dari tiga jenis relasi dalam penerapan *e-government* diatas, selanjutnya terdapat konsep relasi pemerintah dengan pemerintah atau dikenal dengan tipe konsep G-to-G. Tidak sedikit aplikasi yang sudah diterapkan guna mendukung harmonisasi komunikasi di lingkungan pemerintahan. Contoh penerapan e-government dengan

tipe G-to-G ini yaitu aplikasi yang menghubungkan baik dari instansi pemerintah pusat dengan instansi pemerintah daerah atau antar kantor-kantor pemerintah yang ada disuatu daerah.

Selain untuk memudahkan koordinasi, juga sudah terdapat pengembangan *e government* G-to-G dalam ranah perencanaan pembangunan daerah yaitu aplikasi SIPD. Kaitannya dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana relasi (komunikasi) antara Bappeda dengan SKPD/OPD dalam penerapan SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.2.4 Manfaat *E-Government*

Al Gore dan Tony Blair dalam Indrajid (2005:5) menyebutkan terdapat beberapa manfat dari *e-government* antara lain:

1. Memberikan perbaikan dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada stakeholder sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam segala lini urusan pemerintahan.
2. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan *e-government* mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pengimplementasian konsep *Good Corporate Government*.
3. Mampu mengurangi secara signifikan pengeluaran biaya , mobilitas interaksi secara langsung baik pada pemerintah maupun stakeholder dalam penyelenggaraan urusan.
4. Mampu memberikan peluang kepada pemerintah dalam memperoleh sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya terhadap pihak-pihak yang berkpentingan.
5. Mampu menjadi jawaban dalam merespon perubahan global yang cepat, sehingga terciptanya lingkungan masyarakat yang mampu secara cepat mengatasi perubahan yang ada.
6. Mampu menciptakan pengambilan keputusan kebijakan publik secara adil dan demokratis dengan memberdayakan masyarakat

serta pihak-pihak lain pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa *e-government* mampu memberikan manfaat dan pengaruh yang luar biasa bagi pemerintah, stakeholder dan masyarakat.

2.2.5 Hambatan Penerapan E-Government

Dalam penerapan *e-government* sering dijumpai berbagai hambatan. Menurut Sari dan Wirno dalam (Nuravita ,2018) hambatan dan tantangan tersebut berupa:

a. Pengembangan insfrastruktur yang belum merata

   Indonesia merupakan Negara kepulauan yang secara geografis terdiri dari pulau-pulau kecil, dalam hal ini masalah utama yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah perlu melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerataan teknologi informasi (internet) dan aliran listrik diseluruh plosok Indonesia.

b. Kurangnya dukungan dari lembaga perwakilan rakyat

   Walau hadir sebagai perwakilan rakyat, kenyataannya saat ini masih bisa dijumpai tarik ulur pengesahan Undang-Undang oleh DPRD mengenai pengembangan *e-government* di Indonesia.

c. Belum optimalnya pelatihan ataupun pembelajaran pada SDM di Indonesia terkait dengan pentingnya *e-government*. Selain itu pemerintah juga perlu memberikan penghargaan ataupun fasilitas yang memadai bagi para ahli Indonesia, selama ini banyak SDM Indonesia yang berkualitas dan ahli dalam bidang teknologi justru menetap di luar negeri karena mereka merasa lebih di hargai dan mendapatkan *feedback* yang lebih sesuai dengan kinerja yang dilakukan.

d. Peraturan yang belum tersosialisasikan dengan optimal serta penerapannya juga yang belum merata.

e. Kurangnya kesadaran pada jajaran aparat pemerintah terkait penting dan manfaat dari *e-government*.

Dapat kita simpulkan bahwa *e-government* merupakan sebuah konsep dimana pemerintah bisa berinteraksi dengan masyarakat, pelaku bisnis maupun dengan sesama institusi pemerintahan. Selaras dengan pengertian diatas, SIPD juga merupakan bagian dari *e-government*, yang mana berperan sebagai sebuah alat yang bisa mefasilitasi Bappeda dan OPD dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan daerah terutama pada proses perencanaan, sehingga diharapkan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Graycar mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian prinsip atau kondisi yang diharapkan. Kebijakan juga dilihat sebagai sebuah proses dimana melalui cara tersebut suatu organisasi mampu mengidentifikasi capaian apa yang diinginkan dari program atau mekanisme dalam mencapai produk tersebut. Sedangkan Turner dan Hulme memandang kebijakan sebagai sebuah proses yang mencakup proses pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan (*policy making and policy implementation)*. Selanjutnya Michael berpandangan bahwa *policy as a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem,* yang berarti kebijakan dibuat sebagai sebuah respon terhadap masalah yang timbul (Tresiana, 2016).

Shafritz dan Russel (dalam Tresiana, 2016) memberikan definisi kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh pemerintah (*what ever government decides to do or not to do*). Bisa kita lihat bahwa kebijakan berbeda dengan keputusan. Kebijakan lebih menekankan terhadap apa yang sesungguhnya dilakukan atau dikerjakan daripada apa yang diusulkan. Sedangkan

keputusan merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. Sementara itu Chandler dan Plano berpendapat kebijakan publik sebagai sebuah investasi yang berkelanjutan oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka bisa turut serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang diputuskan oleh pemerintah guna memecahkan permasalahan publik. Dalam penelitian ini, SIPD merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan guna memecahkan permasalahan daalam hal perencanaan pembangunan daerah.

2.3.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan sebuah proses yang begitu kompleks, sehingga tidak jarang dalam praktiknya juga terdapat berbagai intervensi kepentingan yang mengandung muatan politis.Sementara itu Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Amanah, 2018) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan dari sebuah keputusan kebijakan dasar, umumnya berbentuk undang-undang namun juga bisa berbentuk perintah-perintah atau instruksi, serta keputusan-keputusan badan peradilan dan eksekutif yang sifatnya penting. Implementasi kebijakan juga dipandang sebagai bagian dari proses kebijakan publik yang menentukan apakah kebijakan tersebut berkaitan dengan kepentingan publik serta dapat diterima dengan baik oleh publik (Aneta,2012). Terdapat beberapa model dari implementasi kebijakan publik yang dikemukakan para ahli. Adapun para ahli yang dimaksud yaitu Van Meter dan Van Horn, Merille S. Grindle, dan George Edward III.

1. Model Van Meter dan Van Horn

   Implementasi kebijakan dianggap oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Aneta, 2012) sebagai suatu proses linier antara kebijakan publik, implementor serta kinerja kebijakan publik. Terdapat

beberapa variabel yang bisa mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik antara lain:

a. Ukuran dan sasaran kebijakan
b. Sumber daya, meliputi dari berbagai aspek mulai dari sumber daya manusia, sumber daya finansial serta waktu
c. Karakteristik agen pelaksana
d. Sikap atau disposisi dari implementor
e. Komunikasi serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik

2. Model Merille S. Grindle

Terdapat dua variabel utama yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu:

a. *Context of Policy*, yang didalamnya mencakup strategi aktor, kekuasaan, serta kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat, karakteristik dari lembaga dimana suatu kebijakan tersebut diterapkan dan respon serta kepatuhan dari implementor kebijakan.
b. *Content of Policy*, meliputi adanya dampak positif yang dihasilkan (*type of benefit*), kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, terdapat terget atau skala perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan yang akan diterapkan, implementor kebijakan, serta sumberdaya.

3. Model George Edward III

Terdapat empat unsur dalam teori implementasi George Edward III yaitu:

a. Komunikasi, berkaitan dengan koordinasi antara pihak yang terkait. Komunikasi juga memegang peranan penting dan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dalam implementasi kebijakan publik. Dalam mengukur variabel komunikasi

terdapat tiga indikator yang digunakan yaitu indikator kejelasan, indikator konsistensi dan indikator transmisi.

b. Sumberdaya, berkaitan dengan sumber daya yang mendukung implementasi sebuah kebijakan yang meliputi Manusia *(Man)* ,Uang atau Anggaran *(Money)*, *M*esin *(Machine).*

c. Disposisi, berkaitan dengan kecenderungan atau keinginan dari implementor terhadap penerapan sebuah kebijakan.

d. Struktur Birokrasi, berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing implementor. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tentu dibutuhkan sinergi yang baik guna tercapainya tujuan kebijakan.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap penerapan SIPD di Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan teori implementasi George Edward III. Alasan penulis menggunakan landasan teori tersebut karena variabel-variabel yang ada didalam nya cocok untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi SIPD di Bappeda dalam hal perencananaan pembangunan daerah, peneliti menilai bahwa teori tersebut akan lebih komprehensif dalam pencarian data dibandingkan dengan teori-teori lainnya.

2.4 Perencanaan Pembangunan Daerah

2.4.1 Pengertian Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan, dan pada hakikatnya juga merupakan sebuah upaya beserta metode guna mencapai tujuan yang harapkan secara terarah, tepat, dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sementara itu Hasibuan (dalam Annavita, 2018) mengungkapkan perencanaan sebagai proses memilih dan menggabungkan fakta disertai dengan menggunakan

asumsi-asumsi terkait masa depan, kemudian merancang atau merumuskan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan guna mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD,RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD disebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu tindakan dalam menentukan masa depan yang tepat dengan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada.

2.4.2 Pengertian Pembangunan

Menurut Sondang P. Siagan (dalam Nuravita,2018) pembangunan merupakan suatu upaya perubahan dan pertumbuhan yang terencana oleh suatu bangsa pemerintahan dalam sebuah negara demi tercapainya modernitas dan sebagai upaya dalam pembinaan bangsa (*nation building*). Sementara itu Ginanjar kartasasmita (dalam Nuravita, 2018) memberikan definisi yang lebih sederhana, dimana pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui usaha yang dilakukan secara terencana. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembangunan merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik secara terstruktur dan terencana guna merespon berbagai kebutuhan masyarakat menyesuaikan dengan kemajuan zaman.

2.4.3 Pengertian Perencanaan Pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu perencanaan yang dilakukan sebagai upaya dalam melakukan perbaikan pemanfaatan sumber daya publik yang tersedia di daerah. Perencanaan pembangunan penting untuk dilakukan karena adanya ketidakberhasilan mekanisme pasar (*Market Failures*), perubahan yang tidak menentu (*uncertainty*) di masa datang, serta guna memberikan gambaran yang jelas terkait arah pembangunan(Wati, 2020). Menurut Permendagri Nomor No 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD,RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan guna menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, serta melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sementara itu Syahroni (dalam Nuravita, 2018) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu upaya terstruktur dari berbagai aktor baik publik (umum) ,pemerintah, swasta (kalangan bisnis), ataupun kelompok masyarakat lainnya untuk bisa menghadapi saling ketergantungan pada aspek-aspek fisik, lingkungan dan sosial-ekonomi dengan cara berikut:

a. Melakukan analisis terkait kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan.
b. Menetapkan tujuan tujuan serta kebijakan-kebijakan pembangunan daerah
c. Merumuskan strategi-strategi dalam upaya pemecahan masalah
d. Memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia dalam penyelenggaan nya.

Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah terdapat berbagai pendekatan yang bisa digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratik, merupakan pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam pelaksanaan perencanaannya guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif, merupakan pendekatan yang dalam pelaksanaan perencanaan pembangunand aerah melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*).

3. Pendekatan politis, dimaksudkan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih kedalam dokumen perencanan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan *Top-down and Bottom-up,* terkait dengan usulan-usulan pemerintah serta musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkatan desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan nasional.

Berdasarkan pengertian perencanaan pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu usaha secara sadar dan sistematis dalam mempersiapkan kegiatan pembangunan, dengan tetap memperhatikan skala prioritas kebutuhan pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan daeerah dalam *e-government* mengacu terhadap definisi perencanaan pembangunan yang disinkronkan dengan definisi *electronic government*, artinya proses pembangunan yang secara sadar dan sistematis dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan , sehingga berbagai urusan pemerintahan mampu dilaksanakan dengan lebih baik, mampu menciptakan relasi yang harmoni antara pemerintah dengan berbagai stakeholder serta mewujudkan efisiensi manajemen pemerintahan. Dengan kata lain, proses dalam mempersiapkan pembangunan daerah yang dilakukan secara sadar dan sistematis dengan memperhatikan prioritas kebutuhan pembangunan, menggunakan sebuah alat yang memanfaatkan teknologi berupa internet atau aplikasi berbasis online dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Dimana hal tersebut diharapkan mampu membawa dampak pada masyarakat luas maupun pemerintahan.

2.5 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Berdasarkan Permendagri No 70 tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang kemudian disingkat SIPD merupakan sebuah sistem yang memiliki kemampuan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan dan mengelola data pembangunan daerah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengawasan kinerja pemerintah daerah. SIPD merupakan sebuah sistem yang menginovasi rangkaian proses perencanaan mulai dari musrenbang Kecamatan dan Kabupaten, forum OPD/SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD sampai pada KUA PPAS menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan mampu untuk di pertanggungjawabkan.

Setidaknya terdapat 8 kelompok data dalam SIPD yang terdiri dari (data umum, sosial budaya, insfrastruktur, ekonomi, keuangan daerah, politk hukum keamanan dan insidental), 31 jenis data serta 2691 elemen data. Berikut ini beberapa jenis data yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Tabel 5. Kelompok Data Sistem informasi Pemerintahan Daerah

No	Kelompok Data	Jenis Data	
1	Data Umum	1	Geografi
		2	Pemerintahan (Administrasi Pemeritahan, Aparatur Negara, Administrasi Kepegawaian
		3	Demografi
2	Sosial/Budaya	4	Kesehatan
		5	Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga
		6	Kesejahteraan Sosial
		7	Agama
3	Sumber Daya Alam	8	Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peteranakan, Perkebunan
		9	Pertambangan dan Energi
		10	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan

No	Kelompok Data	Jenis Data	
			Pertanahan
4	Infrastruktur	11	Perumahan dan Permukiman
		12	Pekerjaan Umum
		13	Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika
		14	Perhubungan dan Transportasi
5	Ekonomi	15	Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi
		16	BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
6	Keuangan Daerah	17	Pengelolaan Aset atau Barang Daerah
		18	Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
		19	Ringkasan APBD
		20	Dana Perimbangan
		21	Pinjaman Daerah
		22	Pajak Daerah/Provinsi
		23	Retribusi Daerah
7	Politik, Hukum dan Keamanan	24	Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
		25	Hukum
		26	Keamanan, Ketertiban Masyarakat
8	Insidensial	27	Bencana Alam
		28	Penyakit Menular
		29	Pencurian Ikan
		30	Kebakaran Hutan
		31	Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Sumber: Bangda.Kemendagri

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai bahan landasan dalam pengembangan konsep dan teori dalam penelitian. Kerangka pemikiran juga merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan didasarkan pada latar belakang, tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Bagan 1. Kerangka Pikir

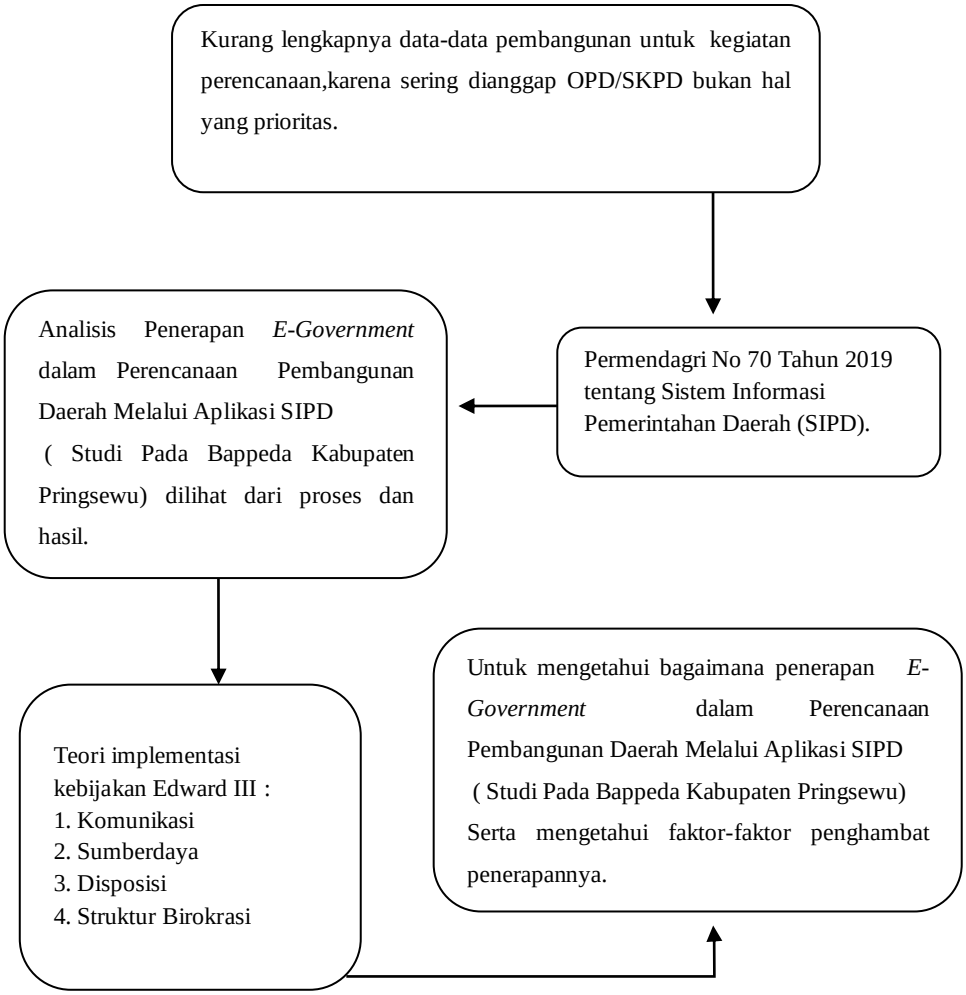

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2021)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha guna menemukan, mengembangkan serta melakukan klarifikasi atas suatu fenomena atau peristiwa dengan memakai metode-metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif,dengan analisis data kualitatif. Menurut Windi (dalam Winda,2018) penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, mencatat, menganalisis , lalu menginterpretasikan kondisi atau kedaan dari objek penelitian. Selanjutnya Nawawi (dalam Winda,2018) menjelaskan penelitian kualitatif adalah serangkaian proses atau kegiatan menyaring data informasi terkait suatu permasalahan dalam sebuah fenomena atau kondisi tertentu, selain itu penelitian kualitatif juga lebih menekankan pada aspek pemahaman atas suatu kondisi atau fenomena secara mendalam dan detail (Patton, 2002:14). Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan sebuah fenomena atau peristiwa yang selanjutnya akan dianalisis dengan teori yang ada. Hasil akhir dari penelitian nantinya berupa narasi atau kata-kata yang berasal dari orang atau perilaku yang diamati sehingga tidak membutuhkan analisis angka-angka. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis memilih penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dapat memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang objektif untuk mengetahui dan menganalisis implementasi SIPD dalam perencanaan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pringsewu.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan dari suatu susunan permasalahan yang akan dikaji atau dibahas secara mendalam dengan tujuan agar pembahasan penelitian lebih terarah dan tidak meluas kemana-mana. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Implementasi Penggunaan SIPD dalam Kegiatan Perencanaan di Bappeda Kabupaten Pringsewu dilihat dari proses dan hasil. Selanjutnya analisis pembahasan Implementasi SIPD terhadap kegiatan perencanaan pembangunan menggunakan teori implementasi Edward III yang terdiri dari empat unsur berikut ini:

- Komunikasi, berkenaan dengan komunikasi dari pihak Bappeda kepada pihak OPD dalam penyampaian informasi bimbingan teknis terkait pengoperasian aplikasi SIPD dalam menunjang ketersediaan data pembangunan maupun dalam proses perencanaan. Komunikasi yang dimaksudkan ditentukan dari beberapa unsur yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
- Sumberdaya, berkaitan dengan sumber daya yang mendukung implementasi aplikasi SIPD pada kegiatan perencanaan di Kabupaten Pringsewu meliputi Sumber daya staff, informasi, wewenang dan fasilitas.
- Disposisi, berkaitan dengan kecenderungan atau keinginan implementor (baik pihak Bappeda maupun SKPD/OPD) dalam penerapan aplikasi SIPD bagi perencanaan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Pringsewu.
- Struktur Birokrasi, berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing implementor terkait penerapan SIPD dalam kegiatan perencananaan pembangunan daerah di Kabupaten Pringsewu.

b. Faktor-faktor yang menghambat pengimplementasian penggunaan SIPD dalam Bappeda Kabupaten Pringsewu terhadap perencanaan pembangunan daerah.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Moleong (2016) merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya guna menghimpun data-data akurat yang diperlukan dalam penelitian. Dalam menentukan lokasi atau tempat penelitian juga harus mempertimbangkan fokus dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pringsewu. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Bappeda karena fokus dalam penelitian ini mengarah pada bagaimana penerapan aplikasi SIPD dalam perencanaan kegiatan pembangunan daerah, selaras dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan sebagai ujung tombak kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2016) data merupakan kumpulan fakta yang berbentuk catatan baik berupa kata, angka maupun lainnya. Berikut jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian antara lain:

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh pengumpul data (peneliti) secara langsung dari objek penelitiannya. Adapun untuk memperoleh data tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

1. Observasi

   Observasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Menurut Masrshal (dalam Sugiono,2013) melalui observasi peneliti akan belajar untuk memahami perilaku dan makna dari perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pringsewu terutama di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2016) wawancara adalah percapakan yang dilakukan untuk maksud tertentu diantara dua pihak yaitu pewawancara sebagai pihak yang memberikan pertanyaan dengan terwawancara sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Etsberg (dalam Sugiyono, 2013) mengungkapkan bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai salah satu teknik dalam mengumpulkan data, apabila peneliti sebagai pihak pengumpul data telah mengetahui secara pasti terkait informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan dari wawancara yang dilakukan dengan para informan adalah peneliti mampu mendapatkan data akurat terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan beberapa informan atau narasumber. Berikut informan atau narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini:

Tabel 6. Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Sunarto	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda
2	Dwi Andysuprianto	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan pendanaan
3	Erwin Soni	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
4	Ari Coudni	Operator SIPD Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
5	Yoppy Kurniawan	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertanian
6	Febby Sabel Supriyatna	Sub Bagian Keuangan Bappeda
7	Evy Suryani Simatupang	Sub Bagian Perencanaan Bappeda

(Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2022)

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tidak langsung yang diberikan kepada peneliti sebagai pengumpul data, biasanya diberikan lewat orang lain atau lewat dokumen. Dengan kata lain bahwa data sekunder berguna sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang data primer dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Adapun data-data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa jurnal, buku, gambar atau foto-foto, Surat Keputusan (SK) yang berkaitan dengan SIPD, serta dokumen-dokumen atau catatan yang relevan dengan fokus penelitian. Berikut dokumen-dokumen yang dibutuhkan peneliti:

Tabel.7 Data Dokumen Penelitian

No	Dokumen
1	Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2021
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
4	Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik
5	Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/61/KPTS/B.01/2022 Tentang Pengelola Administrator Aplikasi SIPD Kabupaten Pringsewu
6	Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor: 800/88/KPTS/B.01/2021 Tentang Tim Teknis Pengelola Aplikasi SIPD Kabupaten Pringsewu
7	Dokumen cetak e-database SIPD tahun 2020
8	Gambar Tampilan SIPD Kabupaten Pringsewu
9	Susunan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Pringsewu Tahun 2022
10	Buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

(Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2022)

3.5 Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono,2013) analisis data adalah proses atau kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah didapatkan baik dari hasil wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan hasil dari temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Sugiyono (2013) Dalam penelitian ini analisis data dilakukan mulai dari mengorganisasikan data-data yang sudah didapatkan dari wawacara atau kumpulan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, memilih mana yang penting dan berkaitan dengan fokus penelitian untuk kemudian membuat kesimpulan yang dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono,2013) terdapat tiga alur kegiatan dalam analisis data, yang meliputi:

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data dapat dipahami sebagai proses memilah dan memilih, merangkum, memfokuskan kepada hal-hal yang penting kemudian menyederhanakan data yang terkait dengan penelitian saja. Hal tersebut akan mempermudah peneliti dalam memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Peneliti melakukan reduksi data dengan mengumpulkan hasil wawancara dari para informan. Selanjutnya data tersebut akan dipilah oleh peneliti untuk mengambil data yang relevan dengan fokus penelitian. Sebagai contoh, peneliti bertanya terkait bagaimana komunikasi dalam penyampaian informasi dalam bimbingan teknis pengoperasian SIPD antara pihak Bapeda dengan SKPD. Setelah peneliti mendapatkan jawaban, peneliti mereduksi data yang merupakan inti dari pertanyaan yang diajukan dan membuang data yang tidak diperlukan.

3.5.2 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel, bagan, hubungan kaussal antar kategori, dan sejenisnya . Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono,2013:249) penyajian data yang paling sering dipakai berupa teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi, sehingga peneliti mampu unuk merencanakan kegiatan selanjutnya dengan berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya. Dalam penelitian ini, penyajian data disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, foto serta tabel.

3.5.3 Menarik Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pola kegiatan yang telah dilakukan mulai mereduksi data, menyajikan data sampai dengan gambaran utuh terkait fenomena yang diteliti, langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dari fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, Peneliti membuat kesimpulan awal pada tahap pengumpulan data pengimplementasian SIPD dalam pengisian data pembangunan yang berguna dalam kegiatan perencanaan,dengan dasar dan dukungan data-data yang telah didapatkan dari dokume cetak *e-database* SIPD Kabupaten Pringsewu. Kesimpulan awal sifatnya masih bersifat sementara dan dapat berubah jika didapatkan bukti bukti yang mendukung. Akan tetapi jika kesimpulan awal didukung dengan buktibukti yang valid, maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel atau bisa dipertanggungjawabkan. Secara sederhana ketiga tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

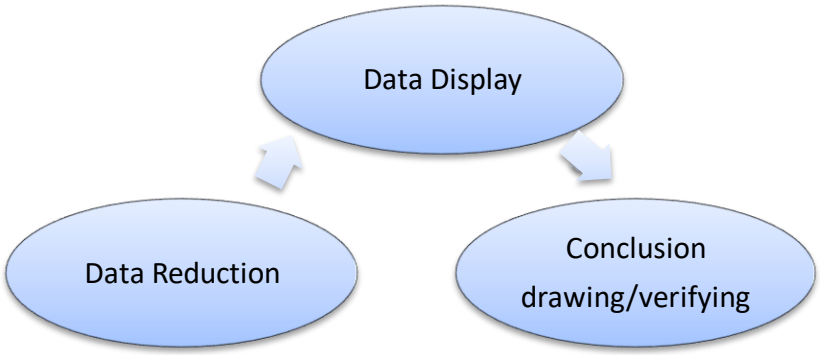

Gambar.3 Komponen Analisis Data (Interaktif)

Sumber: Miles and Huberman (dalam Sugiyomo, 2013)

3.6 Teknik Keabsahan data

Menurut Moleong (2016: 32) teknik keabsahan data merupakan standar validitas atas data yang didapatkan oleh peneliti. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan keabsahan dalam penelitian kualitatif. Terdapat empat kriteria keabsahan sebagai berikut:

3.6.1 Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Pada dasarnya derajat kepercayaan (kredibilitas) menggantikan konsep validitas internal yang berasal dari penelitian nonkualitatif.fungsi dari kriteria ini yaitu pertama, melaksanakan inkuiri sehingga tingkat penemuannya mampu dicapai. Kedua, memperlihatkan derajat kepercayaan hasil dari penemuan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pembuktian pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan peneliti guna memeriksa derajat kepercayaan atau kredibilitas antara lain:

1. Triangulasi

Menurut William Wiersma (dalam Sugiyono,2013: 273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat dipahami sebagai pengecekan atas suatu data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Pada penelitian ini data yang digunakan untuk menguji kredibilitas atau tingkat kepercayaan tidak dapat disamaratakan seperti halnya dalam penelitian

kuantitatif, namun dapat dilakukan pendeskripsian mana pandangan yang sama, pandangan yang berbeda, dan yang spesifik dari sumber data tersebut terkait penerapan SIPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Kesimpulan yang telah dibuat berdasarkan data yang telah dianalisis oleh peneliti, selanjutnya membutuhkan kesepakatan atas sumber data tersebut. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan wawancara dengan topik yang sama terhadap beberapa orang informan atau narasumber sehingga dapat ditemukan data yang akurat.

2. Kecukupan Referensial

Berkaitan dengan bahan-bahan, catatan, dokumentasi yang mampu digunakan sebagai bahan referensi dalam menguji pada saat dilakukan analisis dan penafsiran data. Peneliti akan mengambil referensi dari dokumen atau dokumentasi yang dimiliki oleh pihak Bappeda terakait pelaksanaan Aplikasi SIPD dalam proses kegiatan perencanaan pembangunan.

3.6.2 Keteralihan (*Transferability*)

Berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian mampu digunakan dan diaplikasikan dalam situasi lain. Oleh karena itu untuk melakukan keteralihan, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris terkait dengan penerapan aplikasi SIPD mulai dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu.

3.6.3 Kebergantungan *(Dependeability*)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dari penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat penting dalam menentukan validitas. Untuk melakukan uji kebergantungan pada penelitian kualitatif adalah dengan cara menguji keseluruhan proses penelitian. Karena sering terjadi peneliti tidak memeriksa secara keseluruhan terhadap proses penelitian ke lapangan, namun Pengujian *dependeability* dalam penelitian ini akan dilakukan oleh dosen

peembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

3.6.4 Kepastian (*Confirmability*)

Menguji kepastian data (*confirmability*) berarti menguji hasil dari penelitian, hal ini berkaitan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai terdapat hasil namun tidak terdapat proses penelitiannya. Derajat kepastian ini mampu dicapai melalui audit atau pemeriksaan secara seksama terhadap keseluruhan komponen, proses hingga hasil penelitiannya. Hal yang akan peneliti lakukan untuk menguji kepastian (*confirmability*) adalah dengan mengadakan seminar tertutup atau terbuka dengan mengundang teman sejawat, dosen pembimbing dan dosen pembahas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang penerapan aplikasi SIPD pada kegiatan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penerepannya sudah mampu diimplementasikan dengan cukup baik. Hal tersebut karena pada hasil penelitian ditemukan bahwa dalam proses dan hasil pengimplementasian SIPD pada kegiatan perencanaan sudah memuat indikator-indikator yang mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi seperti yang diungkapkan oleh George Edward III. SIPD sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan *e-government* oleh pemerintah daerah pada kegiatan perencanaan,dalam proses penerapan atau implementasinya sudah mampu memberikan hasil terhadap perencanaan yang lebih tersistematis, akuntabel dan secara langsung juga berpengaruh terhadap pembangunan daerah Kabupaten pringsewu yang menjadi semakin baik . Hal tersebut sejalan dengan tujuan awal dari penerapan SIPD dan sejalan dengan terkait beberapa manfat dari penerapan *e-government* antara lain terciptanya efektivitas, efisiensi, transparansi dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dalam penelitian ini berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.
2. Masih menjadi rintangan dari penerapan aplikasi SIPD dalam kegiatan perecanaan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu adalah Server sistem yang sering mengalami *error* atau *down*, sehingga terkadang menghambat proses penginputan data kedalam aplikasi SIPD. Kemudian sarana dan prasarana (laptop/komputer) yang belum cukup memadai baik di kantor Bappeda maupun perangkat daerah. Serta terdapat item menu belanja barang atau jasa dalam input perencanaan

kegiatan yang terkadang tidak ada didalam SIPD, sehingga dari perangkat daerah harus mengajukan item yang tidak muncul ke BPKAD.

5.2 Saran

1. Pengangaran terhadap sarana dan prasarana pendukung yaitu pengadaan laptop guna menunjang penerapan aplikasi SIPD dalam kegiatan perencanaan disesuaikan dengan jumlah tim yang tertera dalam SK Tim SIPD (*One Man One PC*).
2. Dibuatkan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap keterisian data pembangunan SIPD, guna mencapai keterisiaan database secara menyeluruh.
3. Bappeda bersama dengan BPKAD melakukan penyesuaian terkait dengan item menu belanja yang ada didalam aplikasi untuk disesuaikan dengan keadaan real di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Indrajiti, Richardus eko, dkk. (2005). *e-Government In Action Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta : ANDI

Moleong, L. J. M. 2016. *Metodologi Penelitian kualitatif,*cet. Ke-35 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

Patton, M. Q. (2002). *Qualitatative Reasearch & Evaluation Methods* (3 ed.). Sage Publications. https://archive.org/details/qualitativeresea00patt/page/n7/mode/2up?view=theater "buku"

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung. CV. Alfabeta)

Tresiana, Novita. 2016. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu)

Jurnal:

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(1), 1–12.

Alhanatleh, H., Aboalganam, K., & Awad, H. (2021). Electronic government public value of public institutions in Jordan. *International Journal of Data and Network Science*, *6*(1), 27–36. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2021.10.007

Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *1*(1), 54-65.

Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo). *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini publik*, *23*(1). https://doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1758

Budiani, N. W. (2017). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial (INPUT)*, *2*(1), 49–57.

Engkus, E. (2019). Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat, *Media Bina Imliah* , *14*(4), 2367. https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.346

Herman, R., Perkantoran, A., Ilmu, F., Politik, I., Riau, U. I., & Kaharuddin, J. (2020). PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 64–76. https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4969

Insani Santa Maria & Hasim As'ari. (2022). Komunikasi Antar Implementor Kebijakan Penempatan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupten Pelalawan. *Journal Publicuho*, *5*(3), 616–625. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.15

Ismayanti, L. (2015). Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi*, *4*(2), 42426.

Putri,R.K. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Skripsi.Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *9*(2), 109-116.

Nuravita, W. (2018). *Penerapan E-Planning dalam Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijya

Rangga Deseverians, S. W. (2020). *Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*. *XII*(1), 13–30.

Saragih, R. (2018). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, *7*(1), 77. https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1266

Sudrajat, R. K. (2015). Efektivitas Penyelenggaraan E-Government Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, *3*(12), 2145-2151.

Uddin, nasir. (2021). *Electronic Government for Trust Building*. 1–111.

Wati, L. hera. (2020). Efektivitas Electronic Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan. *journal universitas sumatera utara*.

Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Media Tradisional di Jawa Barat. *Patarjala*, *6*(1), 149-160.

Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, *5*(1), 65-84.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Instruksi Presiden Nomor Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistemm Informasi Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Ealuasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 30 ayat (1) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor B/61/KPTS/B.01/2022 Tentang Pengelola Administrator Aplikasi SIPD Kabupaten Pringsewu

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/88/KPTS/B.01/2021 Tentang Tim Teknis Pengelola Aplikasi SIPD Kabupaten Pringsewu